

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Secara harpiah, tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan untuk pencapaian target dan sasaran pada RPJMD yang tertuang di dalam Renstra Dinas. Bedanya untuk RPJMD periode 2025-2029 tidak ada visi dan misi kepala daerah terpilih tetapi menjalankan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

2. Sasaran;

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang kemudian diturunkan ke dalam rencana pembanguna jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun setiap 5 (lima) tahun yang terdiri dari 7 (tujuh) misi, dengan penjabaran misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dengan tujuan yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 8 (delapan) sasaran yang harus dicapai.

2. Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan tujuan yaitu Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dengan 4 (empat) sasaran yang harus dicapai
3. MISI 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
Dengan tujuan yaitu terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air dengan 4 (empat) sasaran yang harus dicapai serta tujuan meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dengan 1 (satu) sasaran yang harus dicapai
4. MISI 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
Dengan tujuan yaitu meningkatnya kualitas konektivitas Daerah, dengan (tiga) sasaran, tujuan meningkatnya akses infrastruktur dasar masyarakat dengan 3 (tiga) sasaran dan tujuan meningkatnya pengelolaan bencana dengan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai
5. MISI 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
Dengan tujuan yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai
6. MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
Dengan tujuan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan, dengan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai
7. Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal
Dengan tujuan yaitu mempertahankan stabilitas sosial, dengan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai

Pembangunan bidang pendidikan tertuang pada misi I dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator dan 8 (delapan) sasaran pada program strategis yang ke 4 (empat) yaitu Pendidikan yang berkeadilan, dengan penjabaran Program Strategis sebagai berikut :

1. Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas
2. Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal
3. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru

- 4. Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
- 5. Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini



Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai arah kebijakan dalam pengelolaan pendidikan yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2025-2029, dengan visi yang akan dicapai adalah **“Sumatera Selatan maju terus untuk semua”**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang disusun untuk tahun 2025–2029 juga harus bersinergi dengan renstra Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat selaras dalam mengimpelemtasikan arah dan kebijakan dalam pendidikan, dimana di dalam Renstra KL berfokus pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas, dan penguatan pendidikan karakter, dengan prioritas utama, dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1. Wajib Belajar 13 tahun
Kemendikdasmen berkomitmen untuk mewujudkan Wajib Belajar 13 tahun, termasuk penambahan satu tahun pendidikan prasekolah, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pemerataan kesempatan pendidikan
- 2. Peningkatan Kualitas
Prioritas lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, seperti peningkatan kompetensi guru, pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan talenta dan prestasi, serta penguatan pendidikan berbasis literasi, numerasi, sains, teknologi, dan kecerdasan artifisial
- 3. Penguatan Pendidikan Karakter
Kemendikdasmen juga fokus pada penguatan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan, seperti pendampingan kurikulum, pembelajaran, dan karakter

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk revitalisasi dan penambahan ruang pembelajaran, juga menjadi fokus utama untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas

5. Pendidikan Vokasi

Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) juga menjadi fokus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja

6. Pemerataan Akses

Kemendikdasmen juga berkomitmen untuk pemeratakan akses pendidikan ke seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) dan daerah Papua, melalui berbagai program bantuan dan beasiswa, seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa ADEM.

Program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

1. Pertama, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Pemenuhan sarpras, perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan
3. Sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang berkeadilan
4. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
5. Penguatan karakter dengan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat dan ceria
6. Pengutan karakter dengan pelatohan guru BK dan Ke BK-an
7. Pelajaran mendalam (deep learning)
8. Pelajaran koding dan kecerdasan artifisial
9. Test kemampuan akadaemik (TKA)
10. Pengembangan talenta dan prestasi
11. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
12. Pengutan Pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi;

Dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan pendidikan yang dituangkan ke dalam program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Langkah dan kebijakan agar terjadi sinkronisasi arah kebijakan, program dan kegiatan ke dalam, RPJMD dan renstra Dinas Pendidikan yang tertuang pada misi I dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator dan 8 (delapan) sasaran pada program strategis yang ke 4 (empat) yaitu Pendidikan yang berkeadilan, dengan penjabaran sasaran sebagai berikut :

1. Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas
2. Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal
3. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru
4. Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
5. Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi

Dalam mempercepat capaian Pendidikan bermutu untuk semua yang sudah selaras dengan arah pendidikan pada Asta Cita, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk mengelakan semua potensi bangsa menyukkseskan pemajuan pendidikan yang bermutu bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan penyelarasan arah dan kebijakan Pendidikan antara Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Kementerian Pendidikan dasar dan menengah perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya melakukan akselerasi transformasi Pendidikan untuk mencapai Pendidikan untuk semua yang bermutu dan berkualitas dengan membuka akses kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

Renstra Dinas Pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi umum Pendidikan dalam upayanya untuk mengkristalkan peranan pendidikan dengan gambaran umum sebagai berikut:

1. Akses Pendidikan

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu dan biaya. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis Selanjutnya juga sangat diperlukan meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak 4-18 tahun pada Pendidikan khusus dan 16-18 tahun pada Pendidikan menengah serta meberikan akses dan kesempatan yang besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan. Untuk akses jenjang pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dalam upayanya untuk mengurangi anak tidak sekolah (ATS) baik yang putus sekolah dengan mengoptimalkan peranan Pendidikan non formal, anak tidak melanjutkan dengan upaya biaya Pendidikan yang gratis, ketersediaan daya tampung, pemberian Kartu Indonesia Pintar agar anak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan anak tidak pernah sekolah, ini

memang perlu pendataan dengan melibatkan para kepala desa, RT, RW yang ada dilingkungan tersebut agar dapat diberikan hak akan pendidikan pada pendidikan non formal.

2. Pembiayaan Pendidikan

Proses pengalokasian sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan program pendidikan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi sumber-sumber pembiayaan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memastikan tersedianya akses pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan Masyarakat. Kondisi saat ini Masyarakat masih menganggap bahwa biaya Pendidikan mahal, karena itulah perlu peranan pemerintah dalam penyediaan pembiayaan Pendidikan baik melalui dana transfer pusat ataupun APBD agar dapat menghilangkan opini biaya Pendidikan yang mahal.

3. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan sangat erat kaitannya dengan akreditasi dan nilai hasil asesmen nasional yang tertuang di dalam raport mutu pendidikan daerah. Dalam penilaian assesmen nasional terdiri atas penilaian assesmen siswa antara lain nilai literasi, numersi dan survei lingkungan baik guru dan kepala sekolah, pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat;

4. Kondisi Pendidik

Ketersediaan pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran. Saat ini kekurangan pendidik PNS sangat dirasakan penyebabnya adalah pembatasan perekrutan pendidik namun saat ini telah diupayakan perekrutan pendidik melalui jalur P3K serta juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemerataan pendidik. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas pendidik dengan memperkuat mekanisme pelatihan guru, penajaman standar kompetensi guru

5. Kebekerjaan Lulusan

Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat kebekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi.

Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspektif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari satuan pendidikan

Isu lain yang terkait kebekerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebekerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 terutama untuk mengatasi kebekerjaan tamatan SMK pada dunia usaha dan dunia industri;

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan saling melengkapi dan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang baik akan berdampak positif pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa, Kondisi yang dihadapi saat ini memang belum masih terdapat kesenjangan atau belum meratanya kualitas sarana dan prasarana baik sekolah negeri maupun sekolah swasta terutama daerah pelosok dibandingkan dengan diperkotaan. Pemerintah terus berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan agar mutu dan kualitas Pendidikan bisa merata melalui revitalisasi bangunan sekolah, Pembangunan Gedung pengadaan sebagai penjunjang proses pembelajaran baik melalui pendanaan APBD, DAK Fisik ataupun melalui Bantuan Pemerintah (Bantah)

7. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh persen) anggaran tersebut adalah anggaran yang dikelola oleh daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah melalui dana alokasi khusus baik DAK fisik maupun non fisik.

Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan, 7 (tujuh) gambaran umum diatas masih menjadi kendala. Untuk menyikapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis serta komitmen dari semua pihak. Sebagai implikasi dari masalah tersebut, perlunya memecahkan masalah tersebut dengan perencanaan yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengurangi permasalahan sehingga bisa mencapai tujuan misi pendidikan tersebut.

Dalam hal ini, perencanaan pendidikan harus akurat, tepat sasaran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dengan mudah dapat mencapai hasil yang di harapkan dengan maksimal. Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan juga melibatkan komponen masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan jangka waktu perencanaan, maka setiap daerah otonom minimal wajib menyusun tiga jenis perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun setiap 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun setiap 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun . Sementara itu masing-masing SKPD harus menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dengan memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Kementrian.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan menetapkan kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029), penetapan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir karena pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini masih menyisakan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut yang tersusun di dalam rencana kerja Dinas Pendidikan untuk setiap tahunnya dalam upaya untuk mencapai apa yang telah tertuang di dalam RJPMD yang diturunkan di dalam Renstra Dinas Pendidikan. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, social, dan fisik peserta didik, sehingga tujuan pembangunan pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Selatan dapat kita wujudkan. Di samping itu berdasarkan konsepsi di atas dan dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan termasuk pembangunan pendidikan, yaitu adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat undang – undang yang menjadi kewenangan masing – masing, yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,57	8,65	8,73	8,81	8,89	8,97	9,05	Indikator tujuan Inmen 2/2025
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,67	12,71	12,74	12,77	12,81	12,84	Indikator tujuan Inmen 2/2025
3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	5,88	5,88-11,76	8,82-13,23	11,76-14,70	14,71-16,17	17,65	19,12-20,59	Indikator RPJPD
4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	0-5,88	1,47-7,35	2,94-8,82	4,41-10,29	5,88-11,76	7,35-13,23	Indikator RPJPD
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	36,67	41,70	47,08	52,46	62,84	73,22	83,60	Indikator RPJPD
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	33,81	43,44	50,52	57,6	64,68	71,76	78,84	Indikator RPJPD
7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	80,89	82,54	82,59	83,00	84,29	85,98	87,68	Indikator RPJPD
8	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	n/a	8,88	8,9	8,93	8,95	8,98	9	Indikator RPJPD
9	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	n/a	74,46	74,98	75,51	76,04	76,56	77,09	Indikator RPJPD

2. IDIKATOR KINERJA KUNCI

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan								
1	Indek Modal Manusia	angka	Na	Na	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
2	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)	%	70,8	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas	%	48,95	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah	%	97,86	98,36	98,86	99,36	99,86	100	100
5	Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah	%	65,06	75,72	80,72	85,72	90,72	95,72	96,02
6	Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	94	95	96	101	106	111	116
7	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	%	98,78	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	%	66,12	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan	Orang	300	300	324	324	324	324	324
B	Meningkatnya Kualitas Pendidikan								
10	Persentase Akreditasi SLB								
	Akreditasi A	%	10,26	11	13	16	18	20	22
	Akreditasi B	%	38,46	44	47	49	52	55	58
	Akreditasi C	%	25,64	25	23	21	19	17	15
	Akreditasi D/ Tidak Terakreditasi	%	25,64	20	17	14	11	8	5

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase Akreditasi Sekolah Menengah								
	Akreditasi A	%	31,25	43	45	47	49	51	53
	Akreditasi B	%	37,07	38	40	41	42	43	44
	Akreditasi C	%	21,63	15	13	11	8	6	2
	Akreditasi D/ Tidak Terakreditasi	%	10,05	4	2	1	1	1	1
12	Nilai Raport Pendidikan								
	SMA								
	Kemampuan literasi	Nilai	66,93	67,53	68,13	68,73	69,33	69,93	70,53
	Kemampuan numerasi	Nilai	58,24	59,84	61,44	63,14	64,54	66,24	67,84
	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,45	79,16	80,36	81,86	82,76	83,96	85,16
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,01	72,01	73,01	74,01	75,01	76,01	77,01
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,76	60,26	61,75	63,26	64,75	66,25	67,76
	SMK								
	Kemampuan literasi	Nilai	65,09	66,39	67,69	68,99	70,29	71,59	72,89
	Kemampuan numerasi	Nilai	56,82	59,02	61,22	63,42	65,62	67,82	70,02
	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80,89	81,46	82,03	82,6	83,18	83,75	84,32
	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85,06	85,6	86,14	86,58	87,22	87,76	88,3

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,07	70,27	71,47	72,57	73,87	75,07	76,27
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69,25	70,95	71,85	73,15	74,45	75,75	77,05
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,03	59,33	61,63	63,93	66,23	68,53	70,83
	SDLB								
	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,2	76,7	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,06	71,67	72,57	73,67	74,67	75,67	76,67
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67	68,3	69,6	70,9	72,2	73,5	84,8
	Kemampuan literasi	Nilai	58,06	59,66	61,26	62,86	64,46	66,06	67,66
	Kemampuan numerasi	Nilai	56,65	57,25	57,85	58,45	59,05	59,65	60,25
	SMPLB								
	Indeks iklim keamanan	Nilai	69	70,2	71,4	72,6	73,8	75	76,2
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,41	74,21	76,01	77,81	79,61	81,41	83,21
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,12	69,52	70,92	72,32	73,72	75,12	76,52
	Kemampuan literasi	Nilai	64,8	65,3	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,73	57,98	58,23	58,48	58,73	58,98	59,23

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SMALB								
	Kemampuan literasi	Nilai	60,41	60,91	67,41	61,91	62,41	62,91	63,41
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,18	57,68	58,18	58,68	59,18	59,68	60,18
	Indeks iklim keamanan	Nilai	74	75,3	76,6	77,9	79,2	80,5	81,8
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,8	72,9	74,8	76,8	78,8	80,9	82,8
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,2	66,8	68,4	70	71,6	73,2	74,8
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	5,88	5,88-11,76	8,82-13,23	11,76-14,70	14,71-16,17	17,65	19,12-20,59
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	0-5,88	1,47-7,35	2,94-8,82	4,41-10,29	5,88-11,76	7,35-13,23
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	36,67	41,7	47,08	52,46	62,84	73,22	83,6
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	33,81	43,44	50,52	57,6	64,68	71,76	78,84
17	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	n/a	8,88	8,9	8,93	8,95	8,98	9
18	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	80,89	82,54	82,59	83,00	84,29	85,98	87,68
19	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	n/a	74,46	74,98	75,51	76,04	76,56	77,09
20	Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik	%	97,22	98,5	98,75	99	99,25	99,5	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Jumlah Guru bersertifikasi	Orang	10.524	11.420	12.562	13.704	14.846	15.988	17.130
22	Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	Orang	3	4	4	4	5	5	5
23	Jumlah Siswa yang berprestasi nasional	Orang	4	5	6	7	8	9	10
24	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Karakter	orang	Na	100	100	110	120	130	140
25	Jumlah Sekolah Unggulan	Sekolah	Na	Na	1	1	1	1	1
26	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Orang	300	325	350	360	370	380	390
27	Jumlah Masyarakat yang menerima Beasiswa kuliah	Orang	Na	0	0	100	110	120	130
28	Jumlah siswa yang menerima makanan bergizi	Orang	Na	229.537	252.491	275.444	298.398	321.352	344.306

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD TAHUN Anggaran 2026

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2026 sebesar Rp 2.717.228.144.462 dengan Penjabaran Sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi sebesar Rp 2.585.994.152.162, dengan penjabaran sebagai berikut:
 - ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp 1.803.665.189.882
 - ❖ Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 514.250.963.797
 - ❖ Belanja Hibah sebesar Rp 268.077.998.483
- b) Belanja Modal sebesar Rp 132.233.992.300, dengan penjabaran sebagai berikut :
 - ❖ Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 67.054.073.700
 - ❖ Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 26.402.435.500
 - ❖ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 38.777.483.100

Program dan Anggaran APBD;
Dinas Pendidikan untuk tahun 2026 dengan penjabaran sebagai berikut :

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.906.559.939.008
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 619.380.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.500.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	478.380.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.747.336.881.482
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.744.873.581.482
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.413.000.000
6	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	248.500.000
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600.000.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	139.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	51.600.000
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.200.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	299.200.000
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.200.000
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	107.000.000
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.000.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	39.500.000
14	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	39.500.000
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.045.630.000
15	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	29.080.000
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.016.550.000
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.886.000
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.886.000
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.000.000
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	473.540.000
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.400.000
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.140.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.262.969.726
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.000.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.893.449.726
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.400.000
26	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.286.120.000
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.951.800
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.168.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	284.655.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.128.800
B	Pengelolaan Pendidikan	890.576.178.668
X	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	527.871.409.533
30	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	233.672.650
31	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	79.503.150
32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.365.567.176
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.979.897.545

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	198.413.550
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	518.503.250
36	Pengadaan Mebel Sekolah	1.339.413.300
37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	250.000.000
38	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	151.967.555.460
39	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	795.069.750
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	867.798.232
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	12.919.665.600
44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	336.690.320.000
45	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100.000.000
46	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48.000.000
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	4.000.317.590
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	188.990.450
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.328.721.830

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
XI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	334.390.971.312
48	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	237.887.050
49	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	354.131.050
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.630.117.209
51	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	475.013.050
52	Pengadaan Mebel Sekolah	1.310.000.000
53	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	248.790.000
54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	124.822.263.003
55	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.166.410.000
56	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	223.360.000
57	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.629.579.200
58	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	198.691.056.000
59	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	100.000.000
60	Pembangunan Ruang Kelas Baru	606.279.750
61	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah	896.085.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
XII	Pengelolaan Pendidikan Khusus	28.313.797.823
62	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	917.274.000
63	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	160.500.000
64	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.065.041.823
65	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.145.175.000
66	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	267.400.000
67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	7.585.233.100
68	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.065.700.000
69	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	100.000.000
70	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	107.500.000
71	Pembangunan Ruang Kelas Baru	647.189.000
72	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	660.047.900
73	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	189.594.000
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	403.143.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
C	Program Pengembangan Kurikulum	119.450.000
XIII	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	119.450.000
75	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	119.450.000
D	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	103.537.300
XIV	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	103.537.300
76	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	103.537.300

Realisasi Capaian Semester I Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2026	% 2026
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	275.500.000,00	143.679.000,00	52,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	275.500.000,00	143.679.000,00	52,15
4.1.02	Retribusi Daerah	275.500.000,00	143.679.000,00	52,15
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	275.500.000,00	143.679.000,00	52,15
	JUMLAH PENDAPATAN	275.500.000,00	143.679.000,00	52,15
5	BELANJA DAERAH	2.797.359.104.976,00	969.875.502.754,00	34,67
5.1	BELANJA OPERASI	2.657.880.461.351,00	966.648.783.682,00	36,36
5.1.01	Belanja Pegawai	1.803.665.189.882,00	792.733.203.177,00	43,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.374.593.556,00	138.921.080.505,00	23,21
5.1.05	Belanja Hibah	255.840.677.913,00	34.994.500.000,00	13,67
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.657.880.461.351,00	966.648.783.682,00	36,36
5.2	BELANJA MODAL	139.478.643.625,00	3.226.719.072,00	2,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.760.937.000,00	134.700.002,00	0,20
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.220.523.525,00	3.092.019.070,00	9,30
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.497.183.100,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	139.478.643.625,00	3.226.719.072,00	2,31
	JUMLAH BELANJA	2.797.359.104.976,00	969.875.502.754,00	34,67
	SURPLUS/DEFISIT	(2.797.083.604.976,00)	(969.731.823.754,00)	34,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2.797.083.604.976,00)	(969.731.823.754,00)	34,66

Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun	Capaian	Keterangan
			2026	2026	
1	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,73	0	Capaian Pada Triwulan IV
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71	0	Capaian Pada Triwulan IV
3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	8,82-13,23	0	Capaian Pada Triwulan IV
4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	1,47-7,35	0	Capaian Pada Triwulan IV
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	47,08	0	Capaian Pada Triwulan IV
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	50,52	0	Capaian Pada Triwulan IV
7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59	0	Capaian Pada Triwulan IV
8	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	8,9	0	Capaian Pada Triwulan IV
9	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	74,98	0	Capaian Pada Triwulan IV

Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Capaian	Keterangan
			2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(6)		
A	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan				
1	Indek Modal Manusia	angka	0,54	0	Capaian TW IV
2	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)	%	100	0	Capaian TW IV
3	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas	%	100	0	Capaian TW IV
4	Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah	%	98,86	0	Capaian TW IV
5	Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah	%	80,72	0	Capaian TW IV
6	Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	96	0	Capaian TW IV
7	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	%	100	0	Capaian TW IV
8	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	%	100	0	Capaian TW IV
9	Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan	Orang	324	346	
B	Meningkatnya Kualitas Pendidikan				
10	Persentase Akreditasi SLB				
	Akreditasi A	%	13	0	Capaian TW IV
	Akreditasi B	%	47	0	Capaian TW IV
	Akreditasi C	%	23	0	Capaian TW IV
	Akreditasi D/ Tidak Terakreditasi	%	17	0	Capaian TW IV
11	Persentase Akreditasi Sekolah Menengah				
	Akreditasi A	%	45	0	Capaian TW IV
	Akreditasi B	%	40	0	Capaian TW IV
	Akreditasi C	%	13	0	Capaian TW IV
	Akreditasi D/ Tidak Terakreditasi	%	2	0	Capaian TW IV

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Capaian	Keterangan
			2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(6)		
12	Nilai Raport Pendidikan				
	SMA				
	Kemampuan literasi	Nilai	68,13	0	Capaian TW IV
	Kemampuan numerasi	Nilai	61,44	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim keamanan	Nilai	80,36	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,01	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,75	0	Capaian TW IV
	SMK				
	Kemampuan literasi	Nilai	67,69	0	Capaian TW IV
	Kemampuan numerasi	Nilai	61,22	0	Capaian TW IV
	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	82,03	0	Capaian TW IV
	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	86,14	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,47	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,85	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,63	0	Capaian TW IV
	SDLB				
	Indeks iklim keamanan	Nilai	77,2	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,57	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69,6	0	Capaian TW IV
	Kemampuan literasi	Nilai	61,26	0	Capaian TW IV
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,85	0	Capaian TW IV
	SMPLB				
	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,4	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,01	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	70,92	0	Capaian TW IV
	Kemampuan literasi	Nilai	65,8	0	Capaian TW IV
	Kemampuan numerasi	Nilai	58,23	0	Capaian TW IV

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Capaian	Keterangan
			2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(6)		
	SMALB				
	Kemampuan literasi	Nilai	67,41	0	Capaian TW IV
	Kemampuan numerasi	Nilai	58,18	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,6	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,8	0	Capaian TW IV
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,4	0	Capaian TW IV
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	8,82-13,23	0	Capaian TW IV
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	1,47-7,35	0	Capaian TW IV
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	47,08	0	Capaian TW IV
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	50,52	0	Capaian TW IV
17	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	8,9	0	Capaian TW IV
18	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59	0	Capaian TW IV
19	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	74,98	0	Capaian TW IV
20	Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik	%	98,75	0	Capaian TW IV
21	Jumlah Guru bersertifikasi	Orang	12.562	0	Capaian TW IV
22	Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	Orang	4	0	Capaian TW IV
23	Jumlah Siswa yang berprestasi nasional	Orang	6	0	Capaian TW IV
24	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Karakter	orang	100	0	Capaian TW IV
25	Jumlah Sekolah Unggulan	Sekolah	1	2	Capaian TW IV
26	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Orang	350	0	Capaian TW IV
27	Jumlah Masyarakat yang menerima Beasiswa kuliah	Orang	0	0	Capaian TW IV
28	Jumlah siswa yang menerima makanan bergizi	Orang	252.491	0	Capaian TW IV

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan:

1. Maksud;

Pembuatan laporan adalah kegiatan menyusun informasi atau data secara sistematis, objektif, dan faktual, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan berita, pertanggungjawaban, atau temuan dari suatu kegiatan atau penelitian kepada pihak lain. Laporan berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memberikan keterangan, dasar pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban tugas yang telah dilaksanakan

2. Tujuan.

Tujuan penyusunan laporan adalah menginformasikan, memandu, dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan melalui penyampaian informasi yang akurat, lengkap, dan terorganisir mengenai suatu kegiatan, peristiwa, atau topik tertentu. Laporan juga berfungsi sebagai dokumentasi, sarana pertanggungjawaban, dasar evaluasi dan analisis, serta alat komunikasi yang dapat digunakan baik secara internal dalam suatu organisasi maupun dengan pihak eksternal

II. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala

1. Refocusing anggaran
2. Belanja BOS belum bisa dianggap realisasi karena membutuhkan rekonsiliasi Belanja dengan sekolah dan BPKAD
3. Ketidak jelasan realisasi belanja Sertifikasi karena salur langsung ke masing masing individu

a. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Refocusing anggaran harus melihat atas Fungsi belanja terutama pada Dinas Pendidikan
2. Percepatan rekonsiliasi belanja Bos
3. KPPN harus menyampaikan total realisasi atas salur Sertifikasi

III. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan, memang capaian realisasi belum maksimal baik keuangan maupun realisasi kinerja hal ini dikarenakan banyak kendala yang dialami baik terkait perubahan nomenklatur atas dana transfer pusat, kami meyakini diakhir triwulan IV seluruh capaian akan lebih maksimal